

ARTIKEL

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG



Oleh
KOMANG FERRY LESMANA UDAYANA
NIM. 0914041085

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2014

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

ARTIKEL

**Di ajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi**

**Oleh
KOMANG FERRY LESMANA UDAYANA
NIM. 0914041085**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2014**

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PASCA UU NO. 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DI KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

Km Ferry Lesmana Udayana, I Wayan Landrawan, Ratna Arta Windari.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui partisipasi perempuan pasca UU No 2 Tahun 2008 di kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng, (2) mengetahui alasan dan motivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi di dunia perpolitikan, (3) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai politik.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Subjek penelitian ini adalah kaum perempuan yang terlibat dalam kepengurusan politik di kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi, kepustakaan, dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengelompokan data.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) keterlibatan perempuan dalam perpolitikan sudah tinggi, ini terlihat dari hasil bahwa yang perempuan yang terlibat mencapai 32, 62% melebihi kuota 30 % yang telah ditentukan, (2) alasan dan motivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik yaitu hati nurani untuk memperbaiki masalah bangsa, ingin memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki, (3) kendala yang dihadapi perempuan dalam perpolitikan yaitu: kesadaran berorganisasi yang kurang, adanya anggapan dunia politik penuh dengan kekerasan, tidak punya kepercayaan diri, dan perempuan kurang memanfaatkan potensinya.

Kata-Kata Kuesioner : perpolitikan, partisipasi perempuan, UU No 2 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai politik berarti berbicara mengenai kekuasaan. Dimana politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Politik merupakan suatu cara untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau dan patuh

terhadap keinginan kita. Sejak duduk di bangku sekolah dasar kita sudah tidak asing lagi mendengar kata “Politik”. Pendidikan politik sudah ditanamkan sejak kita masih kecil, bahkan sampai saat ini pendidikan politik ditanamkan

kepada kita baik itu dari guru disekolah, dosen dan juga lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kata politik pada umumnya digunakan sebagai kata sifat yang memberikan yang memberikan arti tertentu bagi kata benda. Oleh karena itu di kenal istilah-istilah seperti partisipasi politik, kepentingan politik, dan keputusan politik. Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang di pegang oleh para pejabat pemerintah. Politik merupakan kekuasaan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Titik perhatian disini adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan dan dalam usaha mengatur masyarakat, berhak menggunakan kekerasan fisik yang memaksa. Kekuasaan yang memiliki kedua sifat tadi disebut kekuasaan politik, sedangkan orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik di namakan penguasa politik. Keputusan-keputusan yang di hasilkan oleh penguasa politik dalam usaha untuk mengatur masyarakat disebut kebijakan politik. Sehingga kekuasaan

politik berbeda dari jenis-jenis kekuasaan lainnya yang ada di dalam masyarakat karena memiliki kedua sifat itu.

Dalam masyarakat primitive, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh factor-faktor seperti tingkatan intelektual dan masalah umum dari komunikasi. Berlawanan dengan ini ialah partisipasi dalam masyarakat totaliter, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi, dan yang lainnya mungkin sangat rendah. Sedangkan menurut definisi, salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah, bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Tariff variasi yang paling besar kiranya terdapat dalam Negara demokrasi modern, yang biasanya mendorong adanya partisipasi dengan berbagai cara, pada umumnya justru

membiarkan partisipasi tersebut

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut dengan jenis penelitian dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian ini peneliti juga mendeskripsi hasil penelitian hasil penelitian. Deskripsi itu berupa hasil angket yang sudah penulis berikan. Peneliti ini terlaksana di kecamatan buleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama adalah dengan memberikan kuisioner kepada

menemukan tingkatannya sendiri.

melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan dari partai atau kelompok kepentingan. Berbagai jenis cara-cara berpartisipasi, salah satu contohnya yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Sedangkan yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye.

nara sumber, selain dengan memberikan kuisioner juga dilakukan wawancara sebagai penunjang dari data yang diperoleh. Wawancara dilakukan secara intensif dan juga adanya pengamatan langsung. Pelaksanaan wawancara yang intensif dimaksudkan adalah untuk menjang data tentang factor-faktor pendorong dan penghambat terhadap partisipasi politik perempuan Buleleng. Pengamatan langsung dimaksudkan

adalah untuk mengamati dan mencatat segala aspek rutinitas sosial yang terkait dengan permasalahan perempuan seperti : partisipasi politik dan kedudukan perempuan dalam organisasi sosial dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya semua orang setuju bahwa bentuk pemerintahan yang demokratis merupakan bentuk yang paling ideal dan didambakan oleh rakyat. Kata demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam proses pemerintahan. Para pemimpin merupakan pemegang mandat yang harus tunduk kepada suara rakyat melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam kursi kepemimpinan. Sebuah masyarakat dapat diartikan demokratis jika dalam peri kehidupannya menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara, mengakui dan

memajukan akan kebebasan. Dalam penghargaan terhadap hak yang adil dan setara tersebut tercermin adanya penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Hal ini juga mencakup adanya jaminan partisipasi politik semua warga. Partisipasi dalam sistim politik merupakan tugas yang kompleks dan menantang, khususnya bagi sector-sector masyarakat yang secara tradisional terpinggirkan. Perempuan mewakili salah satu kelompok yang dirugikan sebagai akibat dari peran-peran yang di terjemahkan secara sosial, budaya dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah-ranah produktif, reprodktif dan politik.

Perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif mereka lebih banyak tetapi hal ini tidak berarti ada jaminan terhadap hak-hak mereka. Faktor budaya

merupakan salah satu penghabat bagi perempuan untuk tampil dalam forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi politik semata-mata karena mereka adalah perempuan. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi berbasis gender. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. Karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga berakibat tersingkirnya perempuan dari gelanggang politik. Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan didengar. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. Sementara melalui kebijakan, hukum yang dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk

kekerasan baik domestik maupun publik.

Dengan adanya UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, maka peluang perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik semakin besar. Dimana pemerintah saat ini memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan di legislatif. Ini merupakan kesempatan bagi perempuan untuk terjun di dunia politik, namun dalam berpartisipasi di dunia politik perempuan masih mengalami kendala-kendala yang dapat melemahkan partisipasi di dunia politik. Yang di hadapi kaum perempuan di Indonesia dalam dunia politik dewasa ini lebih merupakan problem structural ketimbang teologis dan kultural seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Sekarang, hampir tidak pernah kita dengar lagi keberatan-keberatan yang bersifat keagamaan atau budaya yang mempersoalkan keterlibatan kaum perempuan dalam ruang-ruang publik. Jika sebelumnya kita pernah mendengar sebuah partai politik melarang perempuan untuk menjadi presiden dengan merujuk pada kitab suci, sekarang tidak ada lagi partai politik yang menyuarakan hal tersebut. Sehingga dengan bertitik tolak dari

pandangan diatas tadi maka ini akan menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk terlibat secara langsung di dunia politik.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam terjun didunia politik adalah rendahnya keterampilan politik kaum perempuan, hal ini disebabkan karena kaum perempuan sejak kecil jarang dihadapkan pada dunia politik yang sangat kompetitif dan dianggap sebagai negative, kotor, kejam, jahat penuh intrik, dan kegiatan politik adalah aktivitas yang relatif keras. Dengan asumsi seperti ini dunia politik kesannya seakan-akan tidak sesuai dengan sikap perempuan yang lemah lembut, cantik, keibuan, dan berbagai ciri feminisme. Sehingga kaum perempuan lebih cenderung memilih mengerjakan pekerjaan domestik dari pada ikut berkecimpung keranah publik.

Sebagian besar partai politik di Indonesia tidak memenuhi kuota 30% bakal calon legislatif (caleg) perempuan. Realitas ini sesungguhnya bertolak belakang dengan dengan upaya-upaya yang dilakukukan para pembuat kebijakan politik di negeri ini untuk kian banyak melibatkan kaum

perempuan dalam proses-proses politik. Telah didetapkannya UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008 yang jelas-jelas menegaskan kepihakkan terhadap kaum perempuan ternyata tidak cukup ampuh untuk membuat kalangan parpol merangkul lebih banyak lagi kaum perempuan.

Saat ini partisipasi politik perempuan mengalami degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Namun secara umum alasan yang digunakan perempuan tidak terjun kedunia politik adalah bahwa perempuan dipandang sebagai sumber godaan dan sumber fitnah dan juga dapat memicu terjadinya konflik sosial. Selain itu juga ada anggapan bahwa tugas politik sangat berat dan perempuan takan mampu menanggungnya karena akal dan tenaga perempuan dianggap lemah.

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbincangkan bahkan, menjadi suatu yang politisi untuk diperdebatkan. Hal ini disebkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan diwilayah publik, definisi, konsep dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya

selalu menempatkan perempuan diluar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, afiliasi suatu partai politik dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya. Oleh karena itu politik selalu di identikan dengan dunia laki-laki, yang memiliki sifat keras, kejam penuh intrik dan tidak sesuai dengan sifat perempuan yang lebih bersifat feminisme. Sehingga dulu perempuan yang terjun di dunia politik sangat minim, dimana peran perempuan masih dibatasi dalam menentukan dan memutuskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran perempuan khususnya pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan pekerjaan tertentu yang sepuluh atau dua puluh

tahun yang lalu hanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah bisa dilakukan oleh para wanita, termasuk pada pekerjaan kasar sekali. Tidak hanya dilihat dari hal pekerjaannya saja perempuan mengalami perubahan, namun dalam dunia politik pun saat ini perempuan sudah mulai terjun kekancah politik. Hal ini di perkuat dengan adanya UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang melibatkan keterwakilan 30% perempuan. Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyertakan 30% keterwakilan perempuan, maka secara tidak langsung perempuan memiliki kesempatan untuk terjun ke dunia politik. Oleh karena itu dengan adanya UU ini maka perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk terjun di dunia politik. Kebijakan pemerintah ini yang melibatkan 30% kaum perempuan, merupakan peluang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Kenyataan yang terjadi di lapangan perempuan saat ini khususnya perempuan di Kecamatan Buleleng sudah berpartisipasi di dunia politik. Hal ini terlihat dari perbandingan antar perempuan dengan laki-laki yang terjun di dunia politik, perbandingannya yaitu

32,62% : 67,38% (Rekapitulasi Pemenuhan 30% Perempuan Serta Keterwakilan 1 (satu) Perempuan dalam 3 (tiga) Calon). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan di Kecamatan Buleleng sudah memenuhi kuota 30% yang diberikan oleh pemerintah. Namun jika dilihat dalam tiap partai politik, ada lima partai politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 yang tidak melibatkan perempuan didalamnya. Partai yang tidak melibatkan perempuan antara lain yaitu Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Partai Patriot. Partai Politik yang tidak melibatkan perempuan didalamnya, tidak dikenakan sanksi baik sanksi hukuman maupun sanksi administratif. Partai tersebut akan tetap mengikuti Pemilihan Umum, namun partai politik yang tidak melibatkan perempuan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya menjadi calon legislatif maupun menjadi anggota dalam partai politik. Partisipasi perempuan juga terlihat keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, seperti menjadi ketua PKK bahkan ada juga perempuan yang

menjadi Camat, yang dijabat oleh seorang wanita. Ini berarti bahwa masyarakat pun sudah ada yang berpartisipasi dalam politik khususnya di lingkungan masyarakat. Namun wanita-wanita yang aktif di masyarakat ini, tidak semuanya ingin terjun di politik untuk menjabat sebagai anggota pemerintahan karena ia merasa bahwa politik itu pekerjaan yang keras, rumit, dan tidak sesuai dengan sifat perempuan sehingga perempuan enggan untuk ikut campur dengan urusan politik. Tapi ada juga perempuan yang memiliki keinginan dan niat untuk terjun di politik, namun ia tidak dapat memenuhi keinginannya dikarenakan kurangnya pengalaman yang dimiliki, merasa belum percaya diri untuk terjun dan terlibat di dunia politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- 1) Partisipasi perempuan khususnya di Kecamatan Buleleng pasca UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengikut sertakan 30% perempuan didalam partai politik, sudah dapat dikatakan memenuhi

kuota tersebut. Hal ini terlihat dari persentase jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, yaitu 32,62% untuk perempuan dan 67,38% untuk laki-laki.

2) Adapun alasan dan motivasi perempuan terjun di dunia politik adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengisi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan baik itu di partai maupun dipemerintahan.

b. Adanya keinginan dari hati nurani untuk terjun di dunia politik. Dimana tujuan terjun ke dunia politik adalah untuk membenahi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Negara. Karena sebagai warga Negara yang baik kita harus lebih mementingkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi. Dan juga adanya keinginan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

c. Adanya dorongan dari keluarga baik itu suami dan anak-anak. Dengan adanya dorongan tersebut dapat memberikan motivasi bagi

perempuan untuk terjun dan terlibat di dunia perpolitikan, tanpa adanya hal tersebut maka seorang perempuan yang terjun di dunia politik akan mengalami kendala internal, yaitu kendala dari lingkungan keluarganya yang tidak mendukung atau memotivasinya.

3) Kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi di kancah politik yaitu :

a. Kesadaran berorganisasi sangat kurang, dimana banyak perempuan tidak senang berorganisasi.

b. Adanya anggapan dikalangan perempuan bahwa di dunia politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, perempuan enggan untuk turut berkecimpung didalamnya.

c. Perempuan sering tidak percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijaksanaan maupun pengambil keputusan.

d. Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya, disamping perempuan terlalu

sibuk dalam dunia domestic mengurus tugas-tugas rumah tangga.

Berdasarkan penelitian ini akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya perempuan perlu usaha baik itu dari pemerintah, sekolah maupun keluarga untuk memberikan pendidikan politik sejak dini dan secara kontinyu baik itu melalui jalur formal maupun non formal.
- 2) Kepada para praktisi politik hendaknya selalu berupaya mendidik masyarakat dalam bidang politik dan tidak mendiskriminasikan perempuan terutama dalam dunia politik.
- 3) Kepada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah supaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan perempuan. Dan apabila mengeluarkan suatu kebijakan khususnya mengenai kepentingan perempuan, maka diharapkan adanya sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat umum mengetahui kebijakan pemerintah yang baru.

- 4) Dalam upaya mensosialisasikan hasil penelitian ini maka diharapkan diadakannya seminar mengenai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Jakarta: Citra Umbara.
- Agustino, Leo. 2007. *Prihal ilmu Politik*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Budiarjo, Meriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : PT. Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 1994. *Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama